

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Partisipasi politik merupakan bentuk nyata dari konsep kedaulatan rakyat. Melalui partisipasi politik, rakyat ikut menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan dan menetapkan tujuan-tujuan dan masa depan masyarakat.

Partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat. Di negara-negara demokratis, banyaknya partisipasi menunjukkan suatu yang baik karena dengan demikian banyak warga negara yang memahami dan mengerti tentang politik serta mereka ikut dalam kegiatan tersebut. Sebaliknya, tingkat partisipasi politik relatif yang rendah menunjukkan bahwa warga negara banyak yang tidak mengerti tentang politik dan mereka tidak mau terlibat dalam politik.

Di negara-negara maju yang mapan demokrasinya, partisipasi politik dalam pemilu tampaknya tidak menjadi persoalan. Relatif rendahnya partisipasi politik tersebut tidak berpengaruh bagi legitimasi dan demokrasi. Namun, tidak demikian halnya dengan partisipasi politik di negara-negara yang baru menerapkan demokrasi. Hal tersebut akan menjadi titik krusial bagi legitimasi pemerintahan terpilih. Salah satu titik krusial dalam partisipasi politik adalah pemberian suara dalam pemilu.

Indonesia, sebagai salah satu negara baru dalam berdemokrasi, setelah selama 32 tahun di bawah pemerintahan otoriter, kecenderungan semakin menurunnya partisipasi politik dalam pemilu menjadi kekhawatiran banyak kalangan. Seperti ditunjukkan di atas, dari pemilu ke pemilu pada masa reformasi ini tingkat partisipasi politik dalam memberikan suara cenderung terus turun. Memang banyak faktor yang menjadi penyebab cenderung

menurunnya partisipasi politik dalam pemilu tersebut, baik karena faktor politis maupun faktor administratif.

Karena itu menjadi kewajiban kita bersama untuk memberikan kesadaran pada masyarakat perlunya meningkatkan partisipasi politik masyarakat di satu sisi, di sisi lain menjadi perhatian bersama bagi para elite politik tentang warning tersebut (tingkat partisipasi yang rendah/golput). Karena rendahnya tingkat partisipasi bukan terletak pada masyarakat, tetapi bisa jadi didorong oleh faktor perilaku elite itu sendiri yang mengecewakan masyarakat.

Kajian ini menunjukkan bahwa keterlibatan pesantren di ranah politik yang semakin marak akhir-akhir ini, secara nyata telah menimbulkan berbagai implikasi yang cukup signifikan. Jami'iyah sebagai pangkal tolak dari dunia santri adalah sebuah potret kegiatan yang berusaha mengembangkan dan melestarikan ajaran Islam yang berhaluan *Ahlussunnah Wal Jama'ah* yang berjalan secara turun temurun seiring dengan proses modernisasi.

Dengan fenomena diatas tersebut dapat ditelusuri bahwa keterlibatan kiai maupun santri kedalam dunia politik dalam proses revitalisasi dan strategi kultural masyarakat santri sehingga dapat berjalan. Meskipun selama ini sudah banyak peneliti yang menjadikan pesantren sebagai objek kajian, namun selalu saja tersedia perspektif tertentu yang belum bisa diungkap. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren memiliki kekayaan khasanah pengetahuan sosial yang dapat diteliti dari berbagai aspek keilmuan. Posisi pesantren yang demikian itu mempertegas sebuah hipotesa bahwa pesantren bukan hanya sebuah lembaga pendidikan Islam semata, tetapi juga telah menjadi entitas politik yang berpengaruh di Indonesia.

Perdebatan tentang keterlibatan pesantren dalam politik selalu berada dalam tarik menarik dua kutup pendapat yang kontradiktif. Yakni antara pendapat yang mengabsahkan

dan menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar, serta pendapat yang mengkritiknya dengan keras sebagai pengingkaran terhadap fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan, yang seharusnya selalu menjaga independensi dan posisi politik.

Pertama, bahwa keterlibatan pesantren dalam politik secara nyata telah mendeligitmasi peran pesantren sebagai otoritas moral dan reverensi keagamaan. Banyak pesantren yang mengalami penurunan kualitas karena Kiai atau pimpinan pesantrennya lebih sibuk berpolitik. Kondisi ini membuat masyarakat memandang pesantren tidak lagi objektif dalam sikap-sikap politiknya, karena cenderung menguntungkan kelompok politik tertentu sehingga terjadi delegetimasi peran pesantren.

Kedua, Pesantren telah turut mengukuhkan politik pragmatis-transaksional, karena pesantren telah menjadikan politik sebagai ajang untuk mempertukarkan dukungan politik dengan kompensasi-kompensasi materi yang diterima. Bias politik yang terjadi dipesantren ini tentu akan semakin menjauhkan pesantren dari masyarakat. Setidaknya hal ini mulai terasa belakangan ini, ketika masyarakat mulai menyoroti sikap politik pesantren yang dianggap hanya merusak independensi pesantren dan memecah umat kedalam politik partisan.

Ketiga, terjadi resistensi masyarakat atas sikap politik pesantren. Hal ini secara nyata dapat disaksikan dalam sikap politik masyarakat yang seakan-akan membangkang terhadap pilihan politik pesantren. Seiring demokratisasi dan perkembangan pendidikan, masyarakat semakin mampu membedakan sikap pesantren sebagai sikap keagamaan yang patut dicontoh, ditaati dan disurituladani. Serta sikap pesantren yang sebetulnya adalah murni politik kepentingan yang tidak berkaitan dengan ajaran keagamaan sehingga tidak mesti ditaati.

Disini terlihat bahwa pesantren perlu hati-hati dalam menentukan sikap politiknya. Sebab keterlibatan politik pesantren memiliki dampak yang tidak sebanding dengan

manfaat yang diperoleh. Apalagi bila kesibukan politik telah melalaikan Kiai maupun pengelola pesantren dari urusan pendidikan di pesantren. Mungkin di masa depan pesantren perlu melakukan revitalisasi peran politik yang lebih sesuai dengan semangat zaman dan keinginan masyarakat yang sudah semakin rasional. Sebab politik pesantren pada dasarnya bukan politik kekuasaan tetapi politik kerakyatan yang bergerak pada ranah kultural.

B. Saran

.Para santri harus kritis dan berpikir rasional dalam membuat pilihan terhadap partai politik agar tidak terkungkung oleh pengaruh kiai dalam mengambil keputusan politik para santri dan seharusnya para kiai harus lebih bijaksana serta kembali kepada peran sesungguhnya bahwa mereka adalah pemimpin agama yang tidak harus mencampuri urusan politik kedalam kehidupan pesantren.

Para santri memiliki kesadaran politik dalam partisipasi politik karena dalam pemilu bukan hanya sekedar memilih para calon legislatif saja akan tetapi harus bisa menentukan nasib bangsa lima tahun kedepan. Pesantren jangan dijadikan komoditi partai politik lagi, fungsi pesantren harus kembali seperti fungsi awal terbentuknya pesantren, tempat belajar mengajar pendidikan agama Islam dan mempertahankan nilai-nilai kultur yang sudah diturunkan dari para aulia sebelum kita.

Para santri harus adil dalam menyikapi suatu masalah dan objektif dalam mengambil sikap karena tidak semua para anggota legislatif itu bersalah, harus ada penilaian yang relevan dalam mempercayai seseorang. Kita harus mengambil sisi positif bahwa suatu saat bangsa Indonesia akan berubah menjadi lebih baik dengan mempercayai kinerja para pejabat legislatif. Karena adapula anggota legislatif yang dapat memperbaiki atau memperjuangkan nasib rakyat.

Kinerja KPUD Yogyakarta harus ditingkatkan lagi kedepannya, pendataan calon pemilih harus diperbaiki lagi dalam pendataannya. Bila perlu membentuk panitia khusus untuk mendata daftar pemilih tetap untuk membandingkan data lapangan dari pihak kecamatan / kelurahan guna kevaliditasan data.